

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, strategi utama yang dilakukan dalam bidang ekonomi adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, lapangan pekerjaan dan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu indikator utama yang dijadikan oleh suatu bangsa untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara, semakin tinggi tingkat kemiskinan di sebuah Negara mengindikasikan bahwa semakin rendahnya tingkat kesejahteraan negara tersebut. Tingkat kemiskinan yang tinggi merupakan suatu masalah besar yang sering dihadapi oleh negara-negara yang ada di dunia, berbagai macam strategi untuk mengatasi kemiskinan telah dicoba oleh sejumlah ahli ekonomi yang sampai saat ini belum terbukti ampuh untuk menghilangkan kemiskinan yang ada di setiap negara.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, data kemiskinan yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2009 sampai dengan 2018 menunjukkan hasil penurunan tingkat kemiskinan, meskipun dalam penurunan kemiskinan tersebut sempat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 jumlah kemiskinan adalah sebesar 25,94 terjadi penurunan sebesar 1,822 juta dari tahun sebelumnya.

**Gambar 1.1. Grafik Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2009-2018**



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun (2018)

Pada tahun 2016 juga terjadi penurunan kemiskinan namun tidak sebanyak yang terjadi pada tahun 2018, penurunan ini menandakan suatu perbaikan kondisi perekonomian dengan menurunnya jumlah masyarakat miskin. Sejak tahun 2009 hingga tahun 2018 tercatat telah terjadi penurunan kemiskinan sebesar 6,58 juta jiwa, penurunan ini merupakan salah satu keberhasilan dari program-program yang telah dibuat oleh pemerintah. Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa hal, dari sisi ekonomi penyebab kemiskinan secara mikro disebabkan karena adanya ketidakseimbangan pola kepemilikan sumber daya yang menyebabkan distribusi pendapatan tidak seimbang. Kemiskinan juga disebabkan karena adanya perbedaan terhadap akses modal. Penyebab kemiskinan lainnya adalah adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktivitas sehingga pendapatan yang diterima pun rendah. Pendapatan yang rendah akan berdampak pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya tabungan

dan investasi akan menyebabkan keterbelakangan. Hal ini disebut dengan lingkaran setan kemiskinan atau biasa disebut *vicious circle of poverty* (Nurkse, 1956).

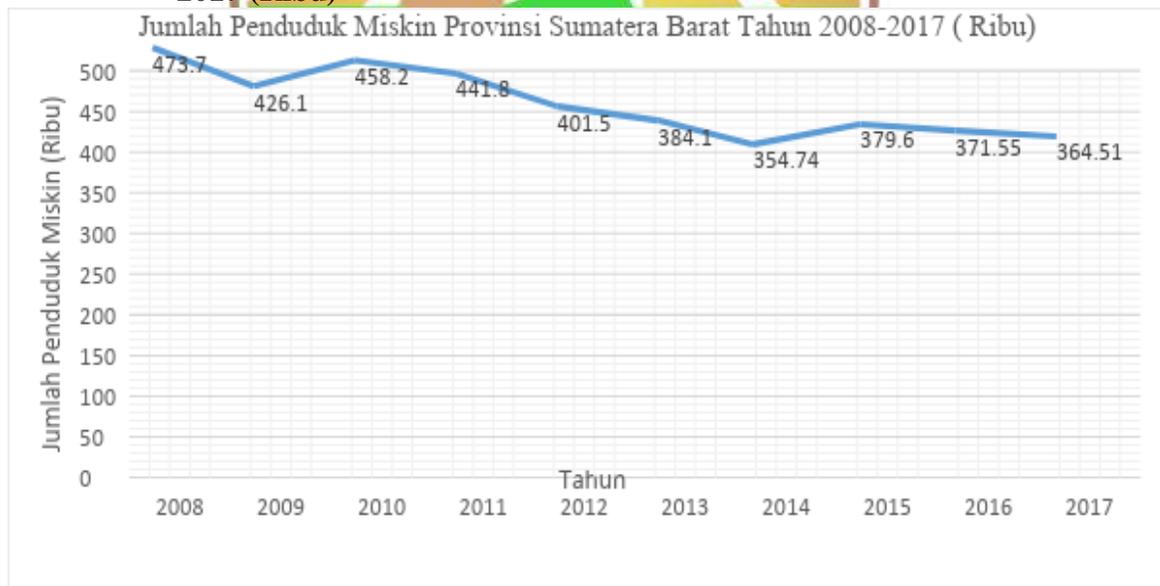
Di Indonesia sejak tahun 2004, strategi pengentasan kemiskinan yang diterapkan berupa PRSP (Poverty Reduction Strategy Papers) atau dikenal dengan SNPK (Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan). Strategi ini mengarahkan bahwa kemiskinan bersifat multidimensi, bukan hanya ketidakmampuan ekonomi melainkan juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan diskriminasi perlakuan. Berbagai macam program telah banyak dilakukan oleh pemerintah Jokowi guna pengentasan kemiskinan, diantaranya melalui kebijakan pengembangan dan penyediaan layanan dasar, meningkatkan efektivitas Bidik Misi bagi para mahasiswa, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta berbagai macam program revolusi mental.

Efektifitas suatu program dapat dilihat dari penurunan tingkat kemiskinan dan penurunan ketimpangan antara masyarakat, hal ini terbukti pada pemerintahan Jokowi terjadi penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pada masyarakat. Pendistribusian program yang tepat sasaran serta merata juga akan menjamin efektifitas penanggulangan kemiskinan dapat berjalan dengan baik. Salah satu program pemerintah yang cukup berhasil adalah Program Keluarga Harapan. Keberhasilan ini dikarenakan oleh kontrol dan bimbingan yang tepat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dari pemerintah untuk lebih mengembangkan program tersebut.



Provinsi Sumatera Barat merupakan Provinsi yang berada di wilayah barat Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008 sampai dengan 2017 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat sering mengalami fluktuasi. Jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat mengalami kenaikan sebesar 32,1 ribu jiwa dari awalnya 426,1 ribu jiwa menjadi 458,2 ribu jiwa, namun pada tahun berikutnya terjadi penurunan yang selalu stabil selama 3 tahun. Selama 3 tahun tersebut Provinsi Sumatera Barat mampu menurunkan jumlah kemiskinan sebanyak 15,09 Ribu jiwa, hal ini merupakan suatu keberhasilan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi tingkat kemiskinan. Pada tahun 2017 tingkat garis kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat yaitu Rp 453.000 naik Rp 27.859 rupiah dari tahun sebelumnya.

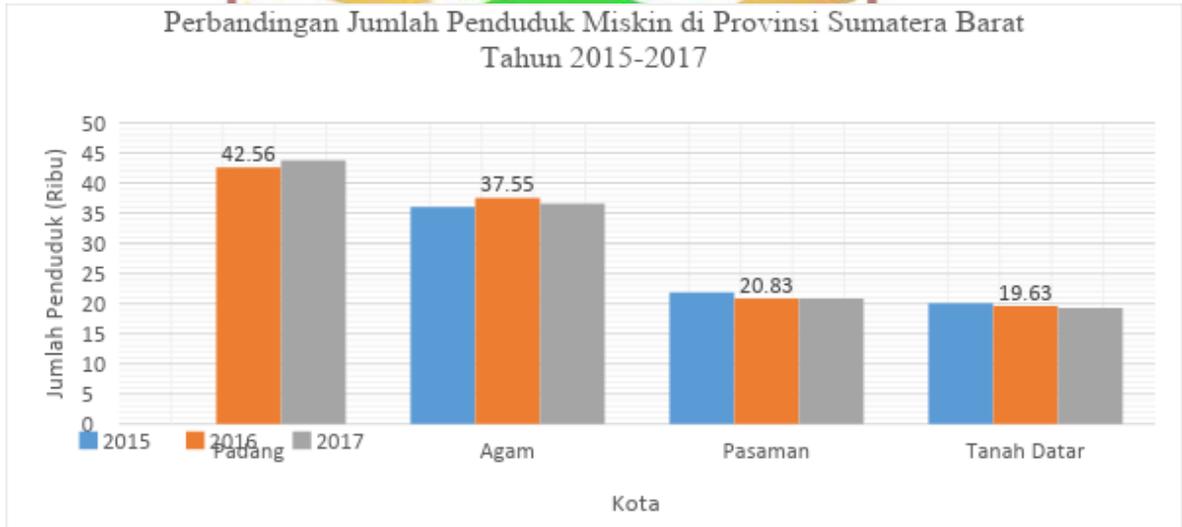
**Gambar 1.2. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008-2017 (Ribu)**



*Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun (2018)*

Semakin rendahnya tingkat kemiskinan maka akan menggambarkan tingkat gini ratio yang semakin rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat tahun 2017 tingkat gini rasio Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 0,32%, turun 0,01% dari tahun sebelumnya yaitu 0,33%. Kota Padang sendiri merupakan ibu kota provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi di Provinsi Sumatera Barat.

**Gambar 1.3. Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017**



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun (2018)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015- 2017 Kota Padang memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 43,75 ribu jiwa naik dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 42,56 ribu atau sebesar 1190 jiwa. Jika dibandingkan dengan kota lainnya, hanya Kota Padang yang mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin, berbeda dengan tiga kota lainnya yaitu, Agam, Pasaman, dan Tanah Datar yang relatif mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2017, tingkat indeks gini Kota Padang sebesar 0,30% masih tinggi jika dibandingkan dengan Kota

Tanah Datar yang hanya sebesar 0,26%. Hal ini menggambarkan tingkat ketimpangan akibat perbedaan tingkat pendapatan yang berbeda pada masyarakat Kota Padang. Sementara itu berdasarkan garis kemiskinan di Kota Padang yaitu Rp 482.763 naik Rp 33.105 dari tahun sebelumnya, tingkat garis kemiskinan di Kota Padang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat garis kemiskinan Provinsi Sumatera Barat.

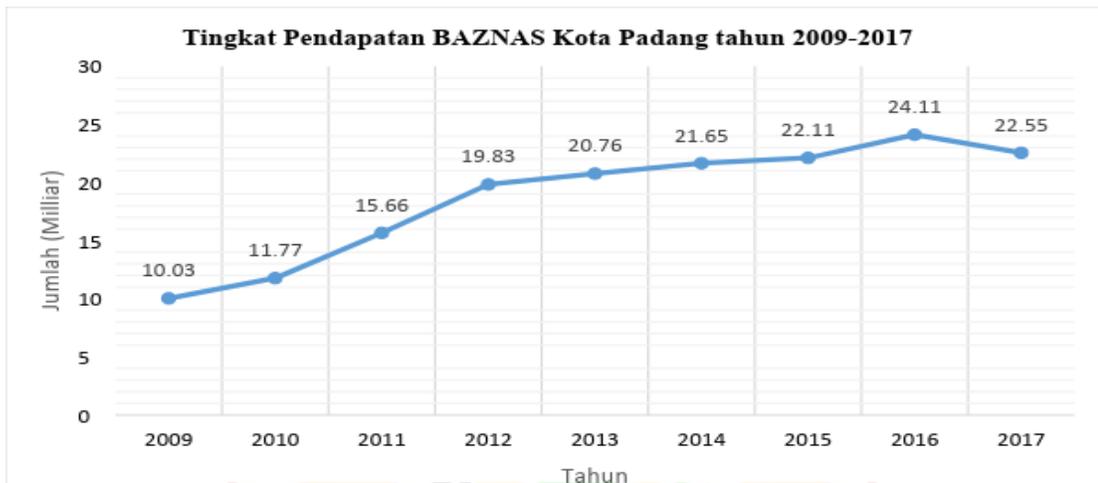
Berdasarkan realita dan fakta yang telah dipaparkan di atas, maka diperlukan suatu cara, solusi, maupun instrumen yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Pemerintah diharapkan mampu mengoptimalkan program-program yang telah direncanakan melalui strategi-strategi yang telah direncanakan sebelumnya. Pemerintah diharapkan dapat menemukan cara yang lebih efektif guna mewujudkan pendistribusian pendapatan yang lebih merata agar dapat terhindar dari permasalahan ketimpangan dan kemiskinan. Berbagai program yang telah dibuat pemerintah selama ini belum sepenuhnya terbukti ampuh dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan.

Dalam islam masalah ini dapat diatasi dengan metode pendistribusian dana zakat yang dilakukan langsung oleh lembaga amil zakat. Fungsi lembaga zakat sangatlah penting karena lembaga ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat secara efektif. Jika lembaga-lembaga ini gagal berfungsi dengan benar, maka pengelolaan zakat secara keseluruhan tidak akan berhasil. Saat ini semakin banyak kita temui berbagai macam lembaga amil zakat yang bertugas untuk pengumpulan, penyaluran dan pendistribusian zakat dari masyarakat. Salah satu lembaga zakat di Kota Padang yang bertugas untuk mengelola dana zakat tersebut



adalah BAZNAS Kota Padang. BAZNAS Kota Padang merupakan salah satu cabang dari BAZNAS Pusat untuk wilayah yang berada di Sumatera Barat, yang merupakan salah satu lembaga nirlaba yang mempunyai tugas untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah serta wakaf (ZISWAF).

**Gambar 1.4. Penerimaan Zakat BAZNAS Kota Padang tahun 2009-2017**



Sumber: BAZNAS Kota Padang (2018)

Pada tahun 2015 tercatat jumlah pendapatan yang diterima oleh BAZNAS Kota Padang sebesar Rp 22.116.168.208, dengan jumlah total mustahik 29.026 orang yang disebar melalui berbagai program. Program-program tersebut berupa padang religius, sejahtera, sehat, cerdas, dan makmur, jumlah *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2014 yang hanya sebesar Rp 21.650.000.000. Pada tahun 2016 pendapatan BAZNAS Kota Padang meningkat lebih tinggi yaitu sebesar Rp 24.110.534.728, hal ini tidak terlepas dari potensi zakat yang diperoleh oleh BAZNAS Kota Padang yang selalu meningkat setiap tahunnya. BAZNAS Kota Padang dikenal sebagai lembaga amil zakat yang memiliki tingkat kepercayaan dan kredibilitas yang dikenal baik oleh masyarakat, hal ini terbukti pada

tahun 2017 BAZNAS Kota Padang mendapatkan sebuah penghargaan BAZNAS Award yang berasal dari Lembaga BAZNAS pusat di Jakarta.

Selama ini penggunaan zakat sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan hanya didasarkan pada satu aspek saja, yaitu aspek material. Namun, seiring berjalannya waktu instrumen pengentasan kemiskinan tidak hanya didasarkan pada aspek material saja, tetapi juga menambahkan aspek spiritual. Salah satu model yang mengukur instrumen kemiskinan yang menggunakan aspek material dan spiritual adalah Central for Islamic Business and Economic Studies (CIBEST) Model. *CIBEST Model* adalah sebuah model yang sedang dikembangkan oleh Irfan Syauqi Beik dan Istrinya Laily Dwi Arsyianti. Pengembangan ini didasarkan pada kuadran CIBEST yang nantinya dapat diklasifikasikan kedalam empat area yaitu, rumah tangga sejahtera, miskin spiritual, miskin material, dan kemiskinan secara absolut (Ekonomi Pembangunan syariah, 2016). Berdasarkan hal ini peneliti tertarik untuk meneliti variabel tersebut, dari latar belakang tersebut peneliti memutuskan judul penelitian **“Analisis Dampak Pendistribusian Dana Zakat Sebagai Usaha Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan Menggunakan Model *Cibest* (Kasus: Baznas Kota Padang).**



## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perubahan pendapatan *mustahik* sesudah dan sebelum mendapatkan bantuan dana zakat?
2. Bagaimana klasifikasi *mustahik* penerima zakat berdasarkan model CIBEST ?
3. Bagaimana perubahan keadaan rumah tangga *mustahik* sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat berdasarkan model CIBEST ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis perubahan pendapatan pada rumah tangga *mustahik* sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat.
2. Memberikan klasifikasi berdasarkan Model CIBEST.
3. Menganalisis pengaruh zakat sebelum dan sesudah menerima bantuan dana zakat menggunakan model CIBEST.



## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat banyak bagi masyarakat luas, baik pemerintah, masyarakat, lembaga pengelola zakat serta akademisi, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Pemerintah: sebagai bahan untuk mengambil keputusan dalam pembuatan program kebijakan yang baik untuk mengentaskan kemiskinan melalui program zakat
2. Masyarakat: memberikan ilmu pengetahuan bacaan yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai cara untuk menghindari kemiskinan
3. Lembaga pengelola zakat: sebagai rujukan dalam perbaikan tata kelola zakat yang lebih baik melalui berbagai program-program pengembangan aspek materi dan spiritual
4. Akademisi: memberikan informasi sekaligus menambah wawasan keilmuan mengetahui pengelolaan dana zakat

## 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus pada BAZNAS Kota Padang, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mustahik* yang menerima bantuan zakat dari BAZNAS Kota Padang dengan jumlah sampel sebanyak 100 rumah tangga. Responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh *mustahik* yang menerima bantuan zakat bina usaha.



## 1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini terdiri dari beberapa bagian, dimana setiap bagian akan menjelaskan berbagai topik permasalahan yang terkait dengan judul penelitian. Berikut sistematika penulisannya:

- **BAB I Pendahuluan**

Pada bab pendahuluan akan menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penelitian.

- **BAB II Tinjauan Pustaka**

Pada bab II tinjauan pustaka menerangkan pengertian, jenis dan pandangan islam serta hikmah dari kemiskinan dan zakat serta terdapat penelitian terdahulu yang akan menjadi literature dalam penelitian ini.

- **BAB III Metodologi Penelitian**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai jenis metode penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

- **BAB IV Gambaran Umum**

Membahas tentang pengaruh mudharabah dan musyarakah terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

- **BAB V Hasil dan Pembahasan**

Bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian, hasil temuan penelitian dan pembahasan.

